



Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)

Murdani¹, Sus Widayani², Hadromi³

^{1,2,3}Universitas Negeri Semarang

Email: memurdani@mail.unnes.ac.id¹

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/abdimas.v23i2.17893>

Received : December 2018; Accepted: January 2019; Published: December 2019

Abstrak

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. UMKM memberi sekitar 87% kontribusi ke dalam sejumlah badan usaha di Indonesia dan memiliki andil sebesar 85% dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam suatu usaha dibutuhkan studi mengenai kelayakan dari usaha tersebut. Namun kenyataannya pemilik usaha hanya terfokus pada pendapatan dan keberlanjutan usahanya. Karena itulah pengembangan masyarakat dengan metode pendampingan sosial perlu dilakukan untuk membantu memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Pengembangan Masyarakat mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok lemah untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk dapat meningkatkan pendapatannya dan berpartisipasi dalam proses pembangunan serta pengambilan keputusan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi di Kelurahan Kandri adalah pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Faktor pendukung dalam pengembangan masyarakat di bidang ekonomi ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah.

Kata kunci: UMKM, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan masyarakat.

PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat saat ini semakin berkembang, terutama akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Akibatnya masalah-masalah yang dihadapi pun semakin kompleks, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berimbas pada berbagai aspek kehidupan, seperti agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi terhadap konsep pembangunan telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Negara dan pembangunan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan suatu negara agar dapat mempertahankan kehidupannya

selalu melakukan pembangunan. Pada sebagian komunitas, pembangunan telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang lebih baik, sementara bagi komunitas lainnya pembangunan justru mengantarkan mereka pada kondisi yang menyengsarakan dimana angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah.

Pembangunan itu sendiri dapat dilakukan melalui beberapa aspek, seperti pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan budaya maupun pembangunan politik. Namun, permasalahan pembangunan yang sering terjadi adalah masalah pembangunan ekonomi.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indone-

sia. UMKM memberi sekitar 87% kontribusi ke dalam sejumlah badan usaha di Indonesia dan memiliki andil sebesar

85% dalam penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan semangat nawacita, pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing secara internasional, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi dengan pemberatan sektor-sektor strategis ekonomi domestik [1]. Dengan adanya sektor UMKM, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor UMKM pun telah terbukti menjadi pilar perekonomian yang tangguh [2].

Dalam perencanaan suatu usaha dibutuhkan studi mengenai kelayakan dari usaha tersebut. Untuk mendirikan UMKM juga dibutuhkan analisis kelayakan terkait faktor-faktor atau aspek yang dapat mempengaruhi kemungkinan berhasilnya (layaknya) pelaksana gagasan suatu usaha [3].

Namun kenyataannya pemilik usaha hanya terfokus pada pendapatan dan keberlanjutan usahanya. Karena itulah pengembangan masyarakat dengan metode pendampingan sosial perlu dilakukan untuk membantu memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Pengembangan Masyarakat mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok lemah untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk dapat meningkatkan pendapatannya dan berpartisipasi dalam proses pembangunan serta pengambilan keputusan.

METODE

UMKM

UMKM adalah kependekan atau singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 mengenai pemberdayaan UMKM, pengertian UMKM dijabarkan menjadi 3 pengertian [3].

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu memiliki aset kurang dari 50 juta di luar tanah dan bangunan dan omset maksimal 300 juta per tahun, laba usaha 2,5

juta per bulan.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, yaitu memiliki aset 50 sampai 500 juta dan omset 300 sampai dengan 500 juta.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Memenuhi kriteria Usaha Menengah dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu memiliki aset

500 juta sampai 10 M dan omset 2,5 M sampai dengan 50 M.

Konsep Pembangunan Nasional

Pembangunan sering diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik [4]. Pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa [5]. Menurut [6] terdapat 5 implikasi utama dari pembangunan:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok.
2. Pembangunan dapat diartikan sebagai bentuk dorongan untuk menumbuhkan kebersamaan dan kesejahteraan.
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.

5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu dengan negara yang lain yang menciptakan hubungan saling menghormati.

Definisi Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama [6]. Menurut [7] pembangunan masyarakat adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat perlu diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kinerja yang secara terus menerus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat [8].

Pembangunan masyarakat di wilayah pedesaan pada masa yang lalu mendasarkan pada azas pemerataan yang pada penerapannya diarahkan secara sektoral. Meskipun dana atau anggaran pembangunan pedesaan jumlahnya cukup besar, tetapi jika dibagi secara merata maka masing-masing desa memperoleh jumlah dana yang relatif kecil, sehingga pada pemanfaatannya kurang optimal [6].

Namun terdapat pergeseran menuju paradigma pembangunan partisipasi pelaku pembangunan ekonomi masyarakat yang menuntut kerangka perencanaan pembangunan spasial atau tata ruang. Kebijakan ini harus dapat menjawab pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi dan produktifitas masyarakat, yaitu sebagai berikut [7]:

1. Bagaimana dapat mendorong partisipasi masyarakat.
2. Bagaimana dapat menciptakan dan meningkatkan kegiatan perekonomian antar sektor di tingkat pedesaan.
3. Bagaimana dapat menyusun perencanaan dan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat pedesaan.
4. Bagaimana dengan mengaktualisasikan peran serta masyarakat yang telah lama melembaga di tengah tradisi masyarakat seperti gotong royong, rembug desa, dan sebagainya.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik [9].

Kehidupan masyarakat yang lebih baik-pada dasarnya meliputi kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan kebebasan [10]. Oleh karena itu, para ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang harus mengutamakan keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang khususnya kelompok masyarakat lemah untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat dalam membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial yang secara bersama menghadapi beragam tantangan seperti:

1. Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi.
2. Mobilisasi sumber daya setempat.
3. Memecahkan masalah sosial.
4. Menciptakan dan membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Pemberdayaan Bidang Ekonomi

Dari berbagai program atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi baik IDT, P3DT, PPK, KUR, PPM Mandiri, P2KP,

dan sebagainya yang secara umum memiliki kemiripan dimensi pendekatan, seperti (1) bantuan modal, (2) bantuan pembangunan prasarana, (3) pengembangan kelembagaan lokal, (4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha, dan (5) fasilitas dari pendampingan.

1. Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tunadaya adalah permodalan. Lambanya akumulasi kapital di usaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambanya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh sebab itu tidak salah jika dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

2. Bantuan Pembangunan Sarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan atau kalau dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran.

3. Bantuan Pendampingan

Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besarnya. Yang perlu dipikirkan adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat.

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu semenjak tahun 80-an

Pendampingan Sosial Sebagai Strategi Pemberdayaan

Bagi para pekerja sosial, kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui pendampingan sosial. Terdapat 5 kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan

sosial:

1. Motivasi

Rumah tangga miskin perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kelompok tersebut dimotivasi untuk terlibat dalam peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan mereka sendiri.

2. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

3. Manajemen Diri

Sebuah kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem.

4. Mobilisasi Sumber

Mobilisasi sumber merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide tersebut didasari oleh pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial.

5. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya dalam membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial yang ada dise-

kitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat.

Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kandri

Faktor Pendukung

Sumber daya alam merupakan salah satu modal dalam merencanakan sebuah pembangunan. Kelurahan Kandri merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang mempunyai bentang lahan pertanian atau perkebunan yang melimpah. Selain itu, sejak dinobatkan sebagai desa wisata, Kandri memiliki berbagai tempat yang disediakan khusus untuk pariwisata. Selain itu, sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam upaya pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia adalah aktor yang menjalankan pembangunan. Kelurahan Kandri merupakan kelurahan dengan penduduk yang banyak yaitu sekitar 4.653 jiwa.

Adanya arus globalisasi dan kemajuan teknologi juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Kandri. Globalisasi dapat berpengaruh pada pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung. Hal yang tampak nyata dalam bidang pertanian adalah penggunaan pupuk kimia dan pengolahan sawah menggunakan mesin. Dari sisi teknologi informasi, masyarakat juga dapat dengan mudah untuk mengakses perkembangan sistem pertanian, pengelolaan ikan atau informasi dalam mendirikan usaha.

Faktor Penghambat

Keterbatasan modal menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat di Kelurahan Kandri. Sedangkan ketersediaan dana dapat mendukung dan menghambat pembangunan. Kondisi ini berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan di Kelurahan Kandri. Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan aspek utama dalam upaya melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Kelurahan Kandri, partisipasi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah masih kurang. Hal ini dapat diketahui dari kurangnya masyarakat dalam musyawarah atau pertemuan yang membahas mengenai pembangunan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang ada di Kelurahan Kandri dapat dilihat dari segi pertanian, perikanan, pariwisata dan UMKM. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dapat dilihat dari upaya pemerintah desa/kelurahan dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan melakukan berbagai macam pelatihan. Faktor pendukung dalam pengembangan masyarakat di bidang ekonomi ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah.

Dari uraian penjelasan tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat diformulasikan dalam sebuah model pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

1. Memberikan arahan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.
2. Membantu mensinkronkan kepentingan dari berbagai unsur masyarakat, dengan demikian dapat memberikan manfaat serentak dan serempak kepada seluruh pelaku pembangunan.
3. Perlu adanya keselarasan mengenai konsep pemberdayaan.
4. Aspek penguasaan faktor-faktor produksi perlu mendapatkan perhatian dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat.
5. Pemberdayaan masyarakat tanpa didukung dengan perubahan administrasi pembangunan.

REFERENSI

- Darwanto. 2013. *Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi dan Kreativitas*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Hal. 142-149. Vol 20, No. 2.
- Lantu, D.C., Triady. M.S., Utami, A.F., Ghazali, A. 2016. *Pengembangan Model Peningkatan Daya Saing UMKM di Indonesia: Validasi Kuantitatif Model*. Jurnal Manajemen Teknologi. Vol 15 No. 1. Hal 77-93.
- Lazurdi, R. F., Fitria, L., Bakar, A. 2014. *Artikel Jurnal Imiah Analisis Kelayakan Usaha Mobile Carwash di Kota Bandung*. Jurnal Online Institut Teknologi Nasional. Vol. 01 No. 03.
- Andini, Ully Hikmah, dkk. 2015. *Pemberdayaan*

- Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol 2. No. 12.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Riharjo, Adisasmita. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Zamhariri. 2008. *Pengembangan Masyarakat: Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan*. Vol 4. No. 1.
- Graha, Adi Nu. Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*.
- Rintuh, Cornelisdan Miar. 2005. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: BPFE.
- Suryana. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.